

Pelaksanaan program literasi digital untuk menanggulangi berita hoaks

Intan Krisnawati, Hasrul, Fatmariza, Junaidi Indrawadi,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**

E-mail: hasrulpiliang1966@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan literasi digital oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, untuk menanggulangi berita hoaks di Provinsi Sumatera Barat belum optimal, dan untuk memberikan deskripsi faktor yang menimbulkan hambatan pada realisasi program literasi digital. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada Diskominfo dan teknik untuk mengumpulkan data yang dipakai yakni lewat observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk melaksanakan uji keabsahan data melalui penggunaan teknik triangulasi sumber dan analisa deskriptif kualitatif, melalui pelaksanaan proses uji banding dan mengecek derajat kepercayaan sebuah informasi yang diraih lewat sumber yang bervariasi. Teknik analisis data yang dipakai yakni melalui proses mereduksi data, mengumpulkan data, dan memaparkan data. Hasil dari penelitian ini mencakup pelaksanaan literasi digital oleh Diskominfo untuk menanggulangi berita hoaks di Provinsi Sumatera Barat, yaitu melakukan Advokasi melalui kerjasama, advokasi melalui pengawasan, komunikasi melalui sosialisasi, dan komunikasi melalui gerakan anti hoaks. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program literasi digital yaitu pelaku memakai akun palsu, komitmen dari media sosial yang begitu melakukan penjagaan privasi pemakainya dan pendanaan Diskominfo Sumbar yang minim.

Kata Kunci: literasi digital, berita hoaks, Diskominfo

ABSTRACT

This research was carried out with the aim of describing the implementation of digital literacy by the West Sumatra Province Diskominfo, to overcome hoax news in West Sumatra Province that was not optimal, and to provide a description of the factors that cause obstacles to the realization of digital literacy programs. This type of research is included in the qualitative research carried out at Diskominfo and the techniques for collecting data used are through observation, interviews and documentation studies. To carry out data validity tests through the use of source triangulation techniques and qualitative descriptive analysis, through carrying out a comparative test process and checking the degree of trust in information obtained through various sources. The data analysis technique used is through the process of reducing data, collecting data, and presenting data. The

results of this study include the implementation of digital literacy by the Diskominfo to tackle hoax news in West Sumatra Province, namely advocacy through collaboration, advocacy through supervision, communication through outreach, and communication through the anti-hoax movement. Factors that become obstacles in the implementation of digital literacy programs are perpetrators using fake accounts, commitment from social media that is so protective of the user's privacy and minimal funding for Diskominfo West Sumatra Province.

Keywords: digital literacy, hoax news, Diskominfo



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Pergeseran media untuk berkomunikasi yang dipakai masyarakat Indonesia tidak bisa diasingkan terhadap pergeseran akan teknologi komunikasi. Praktik dari budaya kita pasti akan mengalami perubahan ketika media komunikasi bergeser cepat menuju digital. Akses yang terbuka, proses cepat dan instan, dan juga mudahnya akses menimbulkan masalah pada era digital. Satu hal yang mesti kita akui dimana canggihnya teknologi digital sekedar memberikan tambahan akan pengetahuan dan keterampilan pemakai. Namun, semua itu tidak ada maknanya, kecuali jika dibingkai oleh cita-cita dari budaya dan karakter. Bangsa yang berhasil dan memiliki kualitas ialah bangsa yang sukses dan memiliki martabat. Ketika dunia berubah menuju pada budaya digital, budaya baru ini mesti bisa menghasilkan manusia yang memiliki karakter dan juga warga negara digital yang memegang nilai-nilai kebangsaan dalam menambah kokohnya bangsa dan negaranya. Dengan artian yang lain, ketersediaan dari media dan teknologi digital mesti dipakai dalam menunjang peningkatan budaya bangsa dan karakter warga negara.

Literasi ialah ilmu yang mesti ada dan menyatu dalam motivasi setiap warga negara, terlebih lagi motivasi warga negara untuk membangun pola pikir yang literasi guna menghasilkan manusia yang berakhlak dan berilmu. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik supaya terbentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertakwa. cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Literasi mempunyai arti kemampuan memakai bahasa dan citra ketika melakukan bacaan, tulisan, menyimak, dan melakukan pengolahan informasi mengenai latar sosial. Pada komputer, semua wujud dari bahasa, foto, film, dan program yang ada bisa diberikan penjelasan (Ali Mudlofi, 2017:121).

Menurut Paul Gilster dalam bukunya Rulli Nasrullah (dalam Giri wiarso, 2016) literasi digital adalah kemampuan untuk paham dan memakai informasi pada bermacam bentuk yang diraih melalui

bermacam sumber yang bisa diakses lewat komputer. Dengan demikian, literasi digital merujuk terhadap kemampuan melakukan bacaan, membuat tulisan, dan melakukan pengoperasian media digital contohnya komputer dan ponsel. Pada umumnya, orang mempunyai anggapan literasi digital menjadi kemampuan dalam memakai internet dan media digital. Namun, banyak orang mempercayai dimana menguasai teknologi yakni bakat yang paling krusial. Terlepas dari kenyataan dimana literasi digital yakni sebuah konsep dan praktik yang mencakup lebih dari sekedar kemampuan dalam penguasaan teknologi.

Literasi digital menitikberatkan terhadap kemampuan pemakai media digital dalam melaksanakan prosedur mediasi media digital yang konstruktif (Kurnia & Wijayanto, 2020; Kurnia & Astuti, 2017). Seorang pemakai melalui keterampilan literasi digital yang baik bukan sekedar bisa melakukan pengoperasian alat, namun turut bisa memakai media digital dengan cara yang bertanggung jawab. Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia yang dilaksanakan dari Kemkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada 2021, Indonesia mempunyai tingkat literasi digital dengan besarnya 3,49. Melalui angka indeks sekitar antara 0 hingga dengan 5, Indonesia masuk dalam golongan yang sedang. Menurut laporan McKinsey 2019, teknologi diasumsikan akan menjadi pengganti sekitar 23 juta pekerjaan ketika tahun 2030.

Menurut Retnowati (dalam Ali Mudlofir, 2017) memberikan pernyataan dimana pemakai media sosial yang positif bisa menunjang prestasi. Disamping itu, pemakai yang negatif bisa menimbulkan akibat buruk akan kehidupan sosial. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan UNICEF dan Kemkominfo (C. Angeli & N. Valanides, 2015), banyaknya pemakai internet di Indonesia yang termasuk anak-anak dan remaja diperkirakan diasumsikan mencapai lebih dari 30 juta. Remaja tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari media sosial sebagai bagian dari kehidupan dan kehidupan keseharian. Mereka saat ini sangat bergantung pada media sosial. Menurut sebuah perusahaan pemasaran sosial, ada 72 juta pemakai aktif media sosial. Facebook menjadi platform jejaring sosial yang terpopuler dipakai.

Dilihat melalui hasil dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, dimana keterlibatan paling besar pada media sosial yakni 97,5% menyalurkan informasi. Potensi bahaya melalui media sosial tidak bisa diatur pada beberapa tahun terakhir, ketika materi disajikan atau diproduksi sekedar untuk menunjang peningkatan status penyedia informasi. Tindakan berbagi informasi membuat naiknya kekhawatiran dan rasa tidak nyaman dari masyarakat. Berbagi informasi secara cepat tanpa mesti melakukan penyaringan kekinian telah menjadi kegiatan sosial. Sepanjang masa pandemi Covid-19, sejumlah kejadian situasi yang tidak memberikan keuntungan untuk pemakai media sosial, contohnya tercemarnya

nama baik, hinaan, perundungan, dan tersebarnya berita hoak, yang bisa memunculkan rasa gelisah dari masyarakat yang sedang bersama melawan Covid-19. Fenomena ini memperlihatkan dimana pemakai internet di Indonesia belum paham akan cara memakai internet secara tepat dan benar.

Program literasi digital diluncurkan secara resmi pada momentum kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 2021. Sejak 2017, Kemkominfo menjadi ujung tombak program tersebut yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia digital. Diharapkan gerakan buta huruf digital ini terus berkembang dan mampu mendukung upaya-upaya lain serta melakukan kerja nyata di masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih mampu menggunakan internet untuk tujuan pendidikan dan produktif.

Menghadapi hal ini, satu diantara upaya yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat lewat Diskominfo yaitu meluncurkan kebijakan yang merupakan program nasional mengenai literasi digital yang tercantum dalam Peraturan dari Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020-2024. Kemudian dipertegas di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2015 dan diimplentasikan dalam Pergub Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 yang diperbarui menjadi Pergub No. 8 Tahun 2020 tentang layanan kerja komunikasi dan informasi masyarakat melalui penguatan literasi digital. Tujuan peluncuran program ini guna membangun Indonesia yang bertambah baik pada digital, membentuk Indonesia yang mempunyai koneksi, bertambah digital, dan bertambah maju.

Melalui program ini, Pemerintah Sumatera Barat hadir untuk menjamin penyebaran informasi yang murni dapat dipercaya dengan menyiarkan suatu program yang bernama penguatan literasi digital. Program penguatan literasi digital adalah program pemerintah Sumatera Barat melalui Diskominfo dalam pengembangan, penumbuhan, dan penanaman kecakapan warga negara dalam menggunakan media informasi. Sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan literasi di akhir tahun 2021 ini, Kominfo disertai semua mitra/jejaring akan melaksanakan puncak dari acara literasi digital bertema "Netizen Fair 2021. Ada empat kelas yang melakukan bahasan mengenai fondasi yang bisa memberikan fasilitas akan pergeseran digital, diawali terhadap infrastruktur, aplikasi, regulasi, tata kelola, sampai pada proses mengembangkan teknologi pelengkap, namun seluruh hal tersebut mempunyai kunci yakni SDM digital. Dalam pelaksanaan literasi digital oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa rintangan dan hambatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program literasi digital adalah terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program tersebut dan juga

SDM yang terdapat pada Diskominfo sangat minim terkhusus dalam melaksanakan program literasi digital.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskripsi yang artinya memberikan gambaran secara general dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang diteliti. Artinya, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan bermacam data mengenai pelaksanaan program literasi digital untuk menanggulangi berita hoaks. Adapun teknik pengambilan sampel untuk penelitian kali ini yakni melalui teknik *purposive Sampling*, yaitu sebuah teknik penelitian yang mengambil informan atas tujuan tertentu dengan sengaja sehingga dapat memberikan informasi terkait penelitian ini. Informan penelitian terdiri dari unsur dinas Kominfo Sumbar, unsur mahasiswa Politeknik Padang dan masyarakat. Penelitian ini diadakan pada Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, dengan bantuan pedoman wawancara, catatan, dan alat perekam. Data yang sudah diraih kemudian dilakukan pengujian keabsahannya memakai Teknik triangulasi sumber. Data dilakukan analisis melalui proses mengumpulkan data, mereduksi data, membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program literasi digital oleh Diskominfo untuk menanggulangi berita hoaks di Sumatera Barat

Program literasi digital diluncurkan secara resmi pada momentum Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021. Program yang telah diinisiasi Kemkominfo sejak tahun 2017 tersebut. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Gerakan literasi digital ini diharapkan menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Menghadapi hal ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan kebijakan yang merupakan program nasional mengenai literasi digital yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang makin cakap digital, mewujudkan Indonesia yang terkoneksi, semakin digital, dan semakin maju.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini adalah, pertama penelitian oleh Ahmad Yani dkk (2021) berjudul "Strategi Melawan Hoaks di Masa Pandemi Covid-19 dengan Optimalisasi Kesadaran Hukum dan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui

Literasi Media (Studi Kasus Desa Margumulya). Di dalam penelitian ini memfokuskan permasalahan kepada pelaksanaan program literasi media sebagai optimalisasi kesadaran hukum dalam membentuk kemampuan berpikir kritis warga Desa Margumulya.

Menurut buku Paul Gilster yang berjudul *Digital Literacy* (1997), literasi digital diartikan menjadi kapasitas dalam penyerapan dan pemakaian informasi pada bermacam bentuk melalui bermacam sumber yang diraih lewat perangkat komputer. Bawden (2001) memberikan ungkapan dimana pengertian baru literasi digital mengacu terhadap literasi komputer dan literasi dari informasi. Literasi komputer timbul ketika 1980-an, ketika mikro komputer menjadi lebih besar jumlah pemakaiannya buka sekedar pada industri namun turut pada kehidupan masyarakat. Namun, literasi informasi baru meluas ketika tahun 1990-an, dikala teknologi informasi yang dalam jaringan menjadikan lebih mudah dalam menciptakan, membuat, dan menyalurkan informasi. Menurut Bawden, literasi digital terkhusus menyangkut terhadap kemampuan teknis contohnya melakukan pengaksesan, membuat rakitan, memahami, dan melakukan penyebaran akan informasi.

Kemajuan teknologi dan informasi telah memperkenalkan generasi masa kini pada dunia literasi digital. Literasi digital telah menjadi hal yang lumrah dalam profesi akademik dan non-akademik. Satu diantara alternatif yang muncul menyangkut terhadap literasi digital, terkhusus peralihan dari sumber bacaan fisik ke digital. Dasar pemikiran literasi digital yakni memberikan kemudahan pembaca dalam meraih informasi kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkan melalui pemakaian perangkat yang terhubung akan internet. Menurut jajak pendapat tahun 2016 yang dilaksanakan oleh APJII, 132,7 juta orang Indonesia dari total 256,2 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet (Kompas, 2016). Berdasarkan hasil survei APJII tahun 2016, bahwa 97,5% berbagi informasi menjadi aktivitas tertinggi dalam media sosial. Beberapa tahun terakhir ini, dampak negatif media sosial menjadi tak terkendali, ketika informasi dibagikan atau diciptakan hanya sekedar menaikkan status pengirim informasi. Aktivitas berbagi informasi lebih banyak menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Saat ini berbagi informasi dengan cepat tanpa perlu menyaring benar tidaknya informasi tersebut sudah menjadi aktivitas sosial.

Literasi digital yang populer melalui istilah digital literasi, yakni kapasitas dalam memakai teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan melakukan akses, memberikan penilaian, memanfaatkan, membuat, dan menyalurkan konten dan informasi. (Widodo, 2012). Haque (dalam buku Feri Sulianta 2020:6) memberikan ungkapan dimana literasi digital ialah kemampuan dalam memakai dan berbagi peluang yang sering muncul dan unik, menggabungkan, dan menyampaikan apa yang dipahami tentang kapan dan bagaimana

mengakses perangkat teknologi informasi dalam meraih sebuah tujuan. Ridwan, (2011) mengungkapkan dimana pengetahuan literasi digital yang baik juga harus didukung oleh kerangka internet yang sehat agar apa yang ingin disampaikan dapat tercapai dan sesuai dengan etika komunikasi digital. Tujuan lainnya, literasi digital yang sehat akan mendorong kreativitas pengguna internet yang sehat, sehingga dapat memberikan pendidikan internet yang sehat kepada generasi muda bangsa, sehingga meningkatkan martabat bangsa.

Dari berbagai macam uraian di atas, maka peneliti menyatakan bahwa literasi digital yakni kemampuan dalam memakai TIK serta untuk untuk paham dan memakai informasi pada bermacam bentuk melalui banyak sumber yang sangat luas yang menjadikan bisa memunculkan sikap kreatif dari pemakai internet. Generasi digital native memandang dan berperilaku berbeda dari generasi yang baru mengenal komputer dan internet. Generasi digital migran dapat belajar bagaimana menggunakan internet, namun lebih sulit dibandingkan dengan generasi digital native yang menerima dan beradaptasi dengan kehadiran teknologi internet yang telah mereka kenal sejak kecil. Jika dibandingkan dengan orang tua yang merupakan migran digital, anak-anak kecil sekarang lebih cepat mendapatkan pendidikan tentang permainan atau simbol karena terbiasa dengan simbol, balita muda beradaptasi dengan cepat.

Televisi juga menimbulkan kesenjangan generasi karena memperkenalkan budaya populer (pop culture) yang populer di kalangan generasi. Kepentingan setiap generasi berbeda karena mereka dibesarkan dalam budaya dan tradisi yang berbeda. Evolusi teknologi komunikasi telah menciptakan tantangan bagi masyarakat, khususnya generasi digital native, dalam hal penerimaan dan transmisi informasi yang bersifat irreversible di media sosial. Berbagai macam informasi bisa diakses dan bisa secara mudah diraih melalui cara *browsing* memakai koneksi internet yang menjadikan masyarakat mesti mempunyai filter khusus dalam melakukan pemilihan dan berpikir secara kritis menyangkut terhadap informasi yang diakses supaya tidak menuju pada informasi yang menimbulkan kesesatan.

Menimbang besarnya jumlah informasi bohong yang menyebar pada media sosial online, terkhusus pada Provinsi Sumatera Barat, pemerintah melakukan pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersedianya peraturan ini mempunyai potensi dalam meminimalisir tersebarnya informasi bohong pada media sosial *online*. Dari pembahasan di atas dan berbagai pendapat teori yang telah ada maka peneliti menulis temuan khusus yang peneliti temukan dilapangan, dimana temuan khusus yang pertama yaitu pelaksanaan literasi digital oleh Diskominfo untuk

menanggulangi berita hoaks di Provinsi Sumatera Barat antara lain terdiri dari 4 sub bagian yaitu:

✚ Melakukan advokasi melalui kerjasama

Tahapan pertama yang dilakukan oleh Diskominfo Sumatera Barat dalam melakukan menjalankan program advokasi adalah melakukan kerjasama dengan Polda Sumbar. Aktivitas yang dilaksanakan yakni menjalankan sosialisasi melalui beberapa pihak. Kerjasama diperlukan untuk memperluas jaringan advokasi dan memudahkan Diskominfo Sumbar dalam berbagi informasi terkait penanganan hoaks di Sumatera Barat. Adapun pihak yang bekerja sama dengan Diskominfo Sumbar adalah pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Diskominfo Sumatera Barat melakukan kerjasama supaya memberikan kemudahan untuk kepolisian pada upaya melakukan pencegahan sebelum tersebarnya informasi palsu atau hoaks di dunia maya. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan Diskominfo Sumbar dengan Polda Sumbar. Polda Sumbar mendapatkan tugas dan fungsi untuk memonitor dan menyelidiki segala informasi, aktivitas dan akun-akun yang tersebar di media sosial dan apabila terdapat pelanggaran maka akan segera diperiksa dan direkomendasikan oleh Diskominfo Sumbar agar informasi atau akun tersebut diblokir oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2012) yang menguraikan advokasi dimulai dari aspek historis, definisi, prinsip-prinsip advokasi, kegiatan-kegiatan dan indikator keberhasilan advokasi dalam program.

✚ Melakukan advokasi melalui pengawasan

Tahapan advokasi berikutnya yang dilakukan oleh Diskominfo Sumbar adalah melakukan proses untuk mengawasi. Pengawasan ini dilaksanakan untuk meminimalisir tersebarnya informasi hoaks pada media sosial. Pengawasan pada kasus ini yakni semua hal yang menyangkut terhadap seluruh aktivitas yang menyangkut akan media sosial terkait isu-isu yang berpotensi menjadi hoaks atau informasi palsu. Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan implementasi program advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Diskominfo Sumbar dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat relasi kerja bersama sejumlah pihak dan melaksanakan proses untuk mengawasi dan menangani segala macam tindakan kejahatan di dunia maya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pidarta (2004:170) pengawasan adalah melakukan kontrol pada waktu pekerjaan sedang berlangsung atau kontrol yang dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan.

✚ Melakukan komunikasi melalui sosialisasi

Sosialisasi ini sangat krusial pada proses menangani berita palsu di media sosial *online*. Dengan demikian, kita bisa menanamkan nilai/norma yang baik terhadap pemakai media sosial, yang mana informasi tidak selalu berarti semuanya baik; juga ada informasi yang

mengandung isu rasis dan ujaran kebencian, serta hoaks/informasi bohong, sehingga diharapkan bisa melakukan pencegahan tindakan sejenis dikemudian hari. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan di beberapa tempat pada beberapa Perguruan Tinggi di Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi kalangan mahasiswa sejak dini agar menjadi bagian dari penggerak literasi digital. Menurut Destrity (2014: 8) kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut.

✚ Melakukan komunikasi melalui gerakan anti hoaks

Diskominfo Sumatera Barat menyediakan program sosialisasi pendidikan gratis tentang literasi digital dan hoaks sebagai salah satu operasi luringnya. Sebagai komunikator, komunikasi persuasif berdampak pada bagaimana pesan kampanye diterima, dipahami, dan dilakukan oleh komunikan atau membujuk pada audiens untuk kegiatan sosialisasi pendidikan. Diskominfo Sumbar dalam kampanye luring dan daringnya mengklaim atau menjelaskan tujuan persuasi. Gerakan anti hoaks Diskominfo Sumbar berpusat pada tujuan membangun komunikasi yang meyakinkan, baik online maupun offline. Sebab, untuk menembus kegiatan sosialisasi pada lapisan masyarakat luas harus menggunakan dua cara tersebut Brie Larson dalam Ruslan, (2013:25). Gerakan anti hoaks yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat termasuk pada jenis *Ideological or Cause-Orientated Campaign* yang bertujuan pada perubahan sosial dan bersifat non komersial.

Faktor penghambat pelaksanaan program literasi digital

a. Banyak akun palsu yang beredar

Menurut Destrity (2014: 8) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa kesadaran publik mengacu pada kemampuan dari publik untuk tahu dimana terdapat informasi atau masalah sosial dan usulan atas aturan dari masalah itu. Faktor yang menghambat Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan proses advokasi dan komunikasi guna meminimalisir tersebarnya berita hoaks oleh yaitu para pelaku cenderung menggunakan akun dengan menggunakan nama samaran dan orang tidak mengetahui identitas dari pemilik akun ini dikarenakan postingan-postingannya tidak menggambarkan biodata dirinya. Dengan demikian, Diskominfo Sumatera Barat melakukan proses edukasi dengan melaksanakan sosialisasi dimana proses ini akan bisa membentuk masyarakat yang pintar yang menjadikan mereka tak mudah melakukan penyebaran berita yang tak diketahui dari mana referensinya. Ini merupakan proses yang bagus dalam pencegahan penyebaran berita bohong.

b. Media sosial menjaga privasi penggunanya

Menurut Mustika Aji (2013: 44) opini, sikap, perilaku, tidak bisa diasingkan. Advokasi membutuhkan perhatian, pendapat dan kesadaran dari publik untuk mendukung kelancaran advokasi dalam menaikkan isu yang sedang digarap. Dorongan dari publik atau *public will* mengacu terhadap sikap sedia dari publik dalam membuat tindakan dan dukungan akan isu atau usulan dari sebuah aturan. Faktor-faktor yang menghambat upaya lobi dan komunikasi Diskominfo Provinsi Sumbar untuk menghindari berita hoaks, terutama komitmen media sosial untuk melindungi rahasia dan privasi penggunaannya, dimana media sosial berkomitmen dalam memberikan kebebasan berekspresi bagi penggunaannya baik berekspresi melalui konten video maupun melalui tulisan.

c. Anggaran yang terbatas

Norren and Brewer (2007:4) menyatakan bahwa anggaran adalah strategi keseluruhan dalam meraih dan menyalurkan keuangan dan sumber daya lainnya sepanjang periode waktu khusus. Namun menurut Rudianto (2009:2) dalam bukunya yang berjudul *budgeting*, anggaran ialah rancangan kerja organisasi ke depan yang diartikulasikan dalam kemasan kuantitatif, formal, dan sistematis. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program literasi digital oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat yakni anggaran Diskominfo Sumatera Barat yang minim menjadikan perlu relasi kerja bersama pihak kepolisian dan *stakeholder* yang lain. Sebab, dalam melakukan pengawasan membutuhkan inovasi sehingga pengawasan yang dilakukan efektif dan efisien misalnya membuat sebuah aplikasi laporan khusus agar masyarakat dapat melaporkan penyebaran berita hoaks dengan mengakses aplikasi tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan khusus yang telah dipadukan dengan pendapat dan pandangan para ahli dan teori yang sudah tersedia, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan literasi digital oleh Diskominfo untuk menanggulangi berita hoaks di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan advokasi melalui kerjasama. Advokasi lewat pembentukan relasi kerja selalu ada jika dibutuhkan pihak-pihak terkait, tidak sekedar pihak kepolisian, namun relasi kerja ini dilaksanakan untuk pemakai media sosial itu sendiri, melalui pihak kepolisian menghimbau terhadap pemakai media sosial online supaya tidak mudah melakukan penyebaran informasi atau konten yang tidak pasti. Kemudian melakukan Advokasi melalui pengawasan. Diskominfo Sumbar melakukan advokasi melalui pengawasan. Tim siber memantau media sosial daring; jika ditemukan akun yang menyebarkan konten atau isu-isu lucu, serta informasi palsu, anggota kejahatan dunia maya akan segera memantau akun tersebut dan bahkan mungkin memblokirnya. Selanjutnya melakukan komunikasi melalui sosialisasi. Diskominfo Sumbar melakukan proses komunikasi

melalui sosialisasi yang sangat dibutuhkan karena dengan sosialisasi dapat mencerdaskan masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya. Terakhir dengan melakukan Komunikasi melalui gerakan anti hoaks. Proses komunikasi akan lebih mudah diterima dan digaungkan oleh masyarakat, yang menjadikan masyarakat Sumatera Barat akan lebih cerdas pada pemakaian media sosial. Faktor menjadi penghambat dalam pelaksanaan program literasi digital yakni pelaku memakai akun yang tidak real, komitmen dari media sosial yang begitu melakukan penjagaan akan privasi pemakainya dan dana dari Diskominfo Sumbar yang yang minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Ahmad Yani, dkk. 2021. Strategi Melawan Hoaks di Masa Pandemi Covid-19 dengan Optimalisasi Kesadaran Hukum dan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Literasi Media (Studi Kasus Desa Margumulya). *Jurnal Komunikasi*. Vol. 2. No. 3
- Arif Rohman. 2019. *Konsep Impementasi Kebijakan dan Penerapannya*. Jakarta: Gramedia.
- Ahmadi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Bawden (2001) Pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi
- Dedi Rianto Rahadi. 2017. Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoaks Di Media Sosial. Vol. 5, No, 1
- Hassoubah, Z.I. 2004. *Developing Creative and Critical Thinking Skills*. Bandung: Nuansa.
- Henri Septanto. 2018. Pengaruh HOAKS dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Kalbiscientia*, Volume 5 No. 2.
- Irdayanti. 2018. *Berpikir Kritis, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, M. 2007. *Kecakapan Hidup: Keterampilan Berpikir Kritis*. Tersedia: <http://kpicenter.org>. *Jurnal UNS*. Vol. 3. No. 3
- Ignatia Mariae Adeline. 2018. Pengaruh Literasi Media Digital Terhadap Tingkat Pengetahuan Mengenai Hoaks Pada Digital Natives Dan Digital Immigrants Di Kota Bandung. *Jurnal UNS*. Vol. 5. No. 2.
- Intje Yusuf. 2016. *Analisis Penggunaan Teknologi Informasi (Internet) Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten*

- Sigi. Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 9, September 2016 hlm 125-136.
- James. 2015. *Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis*. Jakarta: Salemba Medika.
- J. Moleong, Lexy. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 167 hlm.
- Kompas, (2016) survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII).
- Novianti. 2018. Startegi Peningkatan E-literacy Masyarakat dalam Pelaksanaan E- Government Oleh Dinas Komunikasi dan Imformatika Kota Bandung. *Jurnal UNS*. Vol. 4. No. 4.
- Najla. 2016. *Konsep Kemampuan Berpikir Kritis Warga Negara*. Bandung: Gramedia.
- Paul Gilster, (1997) Digital Literacy (1997) sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai sumber

JEECCO